



MENGUNGKIT DAYA SAING UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN EKONOMI NASIONAL

DANANG SRI WIBOWO R

Personel Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

ABSTRAK. Salah satu sektor yang terdampak oleh pandemi covid-19 adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal UMKM berkontribusi terhadap PDB sebesar 60,51% (senilai Rp 9.580 Triliun). Namun demikian, kejayaan UMKM tersebut runtuh saat pandemi covid-19 melanda Indonesia. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memformulasikan kebijakan terhadap UMKM terdampak pandemi khususnya di bidang pembiayaan dan digitalisasi UMKM. Untuk mengungkap berbagai hal tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dan juga metode *critical appraisal* dan *meta analysis* terhadap berbagai jurnal ataupun literatur yang terkait. Metode kualitatif dilakukan melalui *Focus Group Discussion* dan wawancara terhadap *stakeholders* terkait, baik individu maupun institusi. Temuan dari penelitian ini diantaranya bahwa pandemi covid-19 telah berdampak pada UMKM di beberapa sektor yaitu menurunnya pendapatan dan pemasaran, sulitnya akses pembiayaan, dan perlunya adaptasi pemasaran ke teknologi digital. Pada sisi lain, kebijakan yang diambil oleh pemerintah telah relevan dan terbukti mampu mengungkit daya tahan UMKM di masa pandemi covid-19. Simpulan yang didapatkan bahwa untuk mengungkit daya saing UMKM diperlukan beberapa langkah kebijakan yang komprehensif, inovatif, dan adaptif. Pada penelitian ini kebijakan tersebut difokuskan pada bidang kemudahan akses pembiayaan dan perluasan pemasaran melalui dorongan pada digitalisasi/ onboarding terhadap UMKM.

Kata kunci: Daya Saing UMKM, Pandemi Covid-19, Ketahanan Ekonomi, Pembiayaan dan Digitalisasi

ABSTRACT. *One of the sectors affected by the covid-19 pandemic is Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Despite the fact that MSMEs contributing to 60.51% (worth Rp. 9.580 trillion) to the GDP. However, the glory of MSMEs collapsed when the COVID-19 pandemic hit Indonesia. The purpose of writing this paper is to formulate policies for MSMEs affected by the pandemic, especially in the field of financing and digitizing MSMEs. To reveal these things, the author uses qualitative methods as well as critical appraisal methods and meta-analysis of various journals or related literature. Qualitative methods are carried out through Focus Group Discussions and interviews with relevant stakeholders, both individuals and institutions. This study found that the Covid-19 pandemic has impacted MSMEs in several sectors, including declining income and marketing, difficulty accessing financing, and the need for marketing adaptation to digital technology. On the other hand, the policies taken by the government have been relevant and proven to be able to leverage the resilience of MSMEs during the Covid-19 pandemic. In conclusion, to leverage the competitiveness of MSMEs, several comprehensive, innovative, and adaptive policy steps are needed. In this study, the policy is focused on the field of easy access to financing and marketing expansion through the encouragement of digitalization/onboarding of MSMEs.*

Keywords: *MSME Competitiveness, Covid-19 Pandemic, Economic Resilience, Financing and Digitization*

PENDAHULUAN

Pentingnya perwujudan ketahanan ekonomi nasional secara empiris telah tertuang dalam RPJMN (7 Prioritas Pembangunan yaitu (i) penguatan ketahanan ekonomi; (ii)

pengembangan wilayah; (iii) peningkatan SDM; (iv) peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (v) penguatan infrastruktur; (vi) pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;



(vii) stabilitas politik hukum dan transformasi pada publik.

Pemerintah bersama berbagai elemen terkait telah berupaya mewujudkan ketahanan nasional tersebut melalui langkah-langkah yang sistematis, terkoordinasi, dan komprehensif serta holistik. Namun demikian, berbagai upaya tersebut terkendala oleh bencana pandemi covid-19 yang menerpa tidak hanya Indonesia namun semua negara di dunia.

Pandemi Covid-19 telah memunculkan krisis kembar yang tidak terduga yaitu memukul sisi *supply and demand* domestik maupun eksternal ke semua negara. Bahkan pandemi tersebut telah mengubah *landscape* perekonomian global yang berdampak pada timbulnya tekanan masa depan yang lebih berat dan secara intens memapar ke resiko sektor riil keuangan maupun ketersediaan pembiayaan untuk *sustainable economic development*.

Salah satu sektor yang sangat terdampak oleh pandemi adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional. Jika di lihat dari rasio jumlahnya sangat besar yaitu mencapai 64,2 juta dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 60,51% (senilai Rp 9.580 Triliun), kemampuan menyerap 96,92% dari total tenaga kerja yang ada, dan dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi.

Survey yang dilakukan oleh BPS (2020) bahwa terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh UMKM di masa pandemi, antara lain 62,21% Usaha Mikro Kecil (UMK) menghadapi kendala di

bidang keuangan, 39,61% mengalami penundaan pembayaran pajak, dan 35,07% memerlukan bantuan usaha. Adapun research UNDP & LPEM UI (2021) terhadap 1.180 UMKM mendapatkan temuan bahwa 77% UMKM mengalami penurunan pendapatan dan 97% mengalami penurunan aset.

Menyikapi berbagai dampak pandemi covid-19 terhadap UMKM tersebut, Pemerintah sudah melakukan berbagai terobosan guna mengungkit daya saing UMKM, diantaranya adalah melalui penetapan regulasi yaitu UU No. 11 Tahun 2020, PP Nomor 7 Tahun 2021, dan PP Nomor 5 Tahun 2021. Selain itu pemerintah juga telah mengimplementasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan Terhadap UMKM, Program Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dan Kemudahan Ekspor UMKM.

Makalah ini akan mengurai tentang bagaimana dampak pandemi covid-19 terhadap UMKM dan langkah kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan hal tersebut. Kebijakan pemerintah yang komprehensif, inovatif, dan adaptif khususnya di bidang akses pembiayaan dan dorongan pada digitalisasi/ onboarding terhadap UMKM serta ekspor akan menjadi fokus penting yang akan di bahas secara riil, terinci, dan mendetil.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dan juga metode *critical appraisal* dan *meta analysis* terhadap berbagai



jurnal ataupun literatur yang terkait. Metode kualitatif dilakukan melalui *Focus Group Discussion/ FGD* dan wawancara terhadap *stakeholders* terkait, baik individu maupun institusi.

Proses FGD dilakukan dengan beberapa pemangku kepentingan dan juga pelaku UMKM di wilayah Toba (Kabupaten: Humbang Hasundutan, Tobasa, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara). Selain itu juga dilakukan di wilayah Borobudur (Kabupaten: Magelang, Purworejo, dan Sleman). Pada sisi lain, pendalaman data juga dilakukan dengan beberapa pemangku kebijakan Provinsi Maluku saat kunjungan dan berdiskusi di Jakarta.

Selain melalui metode tersebut, penulis juga melakukan *critical appraisal* dan *meta analysis* terhadap berbagai jurnal maupun literatur terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kurasi terhadap analisis maupun temuan penelitian, pokok permasalahan yang diungkit sebagai dampak pandemi covid-19 terhadap UMKM adalah permasalahan di bidang akses pembiayaan, dan dorongan digitalisasi/onboarding terhadap UMKM.

a. Akses UMKM terhadap Pembiayaan

Berdasarkan proses kurasi yang telah diidentifikasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, khususnya di masa pandemi covid-19 perluasan pemasaran melalui salah satunya adalah pembiayaan. Menteri

Koperasi dan UMKM Teten (2021) dalam rakor di Kementerian Koperasi dan UMKM mengemukakan bahwa pembiayaan menjadi permasalahan bagi UMKM khususnya yang berskala ekspor, sehingga diperlukan peran LPDB agar mampu mengurai dan menjembatani penyelesaian permasalahan tersebut.

Bappenas dan Universitas Indonesia (2021) dalam penelitiannya juga mengungkap bahwa banyak UKM yang mengalami *opacity information* (kegelapan informasi) dalam mendapatkan akses pembiayaan. Akses pembiayaan masih cenderung dianggap rumit dan sulit, serta literasinya juga minim. Dalam hal ini, Rofikoh (2021) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa ada beberapa indikator penyebab UMKM sulit dalam mengakses pembiayaan formal yaitu *information opacity*, *information asymmetry*, kondisi *granularity* pembiayaan UMKM yang tersebar kecil-kecil, dan meningkatnya *monitoring cost* perbankan. Selaras dengan hasil penelitian Rofiqoh tersebut, data di OJK (2021) mengungkapkan adanya 74% UMKM belum memiliki akses ke *fintech* dan Indeks inklusi keuangan Indonesia sebesar 76,9% masih relatif rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.

UMKM mayoritas cenderung masih berpandangan bahwa akses ke pembiayaan masih rumit karena adanya prosedur yang sulit mereka penuhi. Dalam hal ini Devi dan Erna (2019) pada penelitiannya mengemukakan bahwa faktor tingginya bunga dan prosedur administrasi yang rumit menjadi kendala UMKM



untuk mengakses pembiayaan ke lembaga pemerintah maupun swasta. Selain hal tersebut, UMKM juga dihadapkan pada minimnya literasi pembiayaan yang berdampak pada ketidaktahuan mereka terhadap berbagai fasilitas akses pembiayaan, bahkan akses ke pembiayaan dari pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Terkait dengan hal itu, Sedinadia (2021) mengemukakan bahwa minimnya literasi dan kurangnya permodalan menjadi persoalan yang dihadapi UMKM. Minimnya literasi tersebut berakibat pada tumbuhnya hutang UMKM terhadap lembaga keuangan konvensional dengan bunga yang tinggi.

Pada sisi lain, FGD yang dilakukan dengan para pemangku kebijakan di wilayah Toba (Kabupaten: Humbang Hasundutan, Tobasa, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara) mendapatkan fakta bahwa UMKM di wilayah tersebut mayoritas masih sangat memerlukan fasilitas dari pemerintah dalam hal dukungan/insentif di bidang pembiayaan. FGD di Kabupaten Humbang Hasundutan melibatkan para kepala dinas dan pelaku UMKM, demikian pula FGD di Kabupaten Tobasa, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Wawancara mendalam juga dilakukan terhadap pelaku UMKM.

Demikian pula dalam diskusi di beberapa wilayah Borobudur yaitu Kabupaten Magelang, Purworejo, dan Sleman juga melibatkan para pemangku kebijakan dan mendapatkan hasil yang serupa tentang pentingnya kemudahan dan fasilitas pembiayaan terhadap UMKM di masa pandemi covid-19.

Pada lingkup regional, ASEAN SME Policy Index (2021) mengemukakan fakta/temuan bahwa tantangan yang dihadapi UMKM pada masa pandemi covid-19 mencakup literasi keuangan minim dan keterampilan manajemen rendah. Dari sisi kebijakan pembiayaan, Farhad dkk (2021) mengemukakan bahwa negara-negara Anggota ASEAN telah mengambil kebijakan melalui peningkatan rasio penjaminan kredit untuk memastikan kegiatan ekonomi UKM tetap bertahan dan tumbuh. Kemudian secara bertahap rasio tersebut perlu diturunkan seiring dengan terwujudnya *new normal*. Disampaikan dalam jurnalnya bahwa “beberapa kebijakan tersebut antara lain Monetary Authority of Singapore (2020) yang mengambil langkah menciptakan skema penjaminan kredit untuk bank-bank Singapura yang meningkat menjadi 70% (ICLG, 2020). Dalam kasus Indonesia, pemerintah mengusulkan skema jaminan kredit baru (US\$7 miliar) hingga November 2021 untuk menutupi pinjaman bagi lebih dari 60 juta UKM (The Jakarta Post, 2020b). Malaysia berusaha memperluas CGC hingga 80% untuk memastikan bantuan keuangan bagi UKM pada 2020–2021 (CGC, 2020). Di Filipina, pemerintah pada 15 April 2020 menyetujui pengurangan biaya penjaminan dari 1% menjadi 0,5%, dan Philguarantee (lembaga utama Penjaminan Negara Keuangan Filipina) meningkatkan cakupan penjaminan untuk UKM menjadi 90% (Philguarantee, 2020)”.

Pada lingkup global, terungkap bahwa UKM mewakili hampir 75% dari semua pekerjaan



di sektor yang paling terpengaruh dibandingkan dengan 60% dalam total ekonomi bisnis. Pada masa pandemi covid-19, di seluruh dunia hampir 40% survei bisnis menunjukkan bahwa lebih dari 50% UKM mengalami penurunan pendapatan yang besar dan berisiko gulung tikar dalam waktu kurang dari tiga bulan. Kepailitan diperkirakan akan meningkat secara signifikan sebesar 17% pada tahun 2020 dan 16% pada tahun 2021 (Lucia,2020). Pitter dan Fensca (2018) dalam jurnalnya mengidentifikasi bahwa para pelaku UMKM menghadapi persoalan antara lain kurangnya permodalan, UMKM sulit mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan karena persyaratan yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

Berbagai hal tersebut diperdalam oleh European Investment Bank (2021) yang berpandangan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di seluruh dunia. Mereka mewakili sekitar 90% bisnis dan lebih dari 50% lapangan kerja di seluruh dunia. Disampaikan bahwa permasalahan terbesar dalam penumbuhan bisnisnya adalah kurangnya akses keuangan. Mereka menghadapi kesulitan untuk mengakses keuangan (Susan dkk, 2021). Akses UMK ke pembiayaan/ kredit memburuk selama krisis keuangan dan kendala kredit tetap tinggi untuk beberapa negara kawasan euro (John McQuinn, 2019).

Berbagai pandangan pada lingkup global tersebut selaras dengan hasil penelitian ADB (2018) dalam Sung Su Kim yang mengemukakan bahwa pada akhirnya banyak UKM yang tunduk

pada pinjaman dengan suku bunga tinggi atau persyaratan agunan yang mahal. Sung Su Kim menjelaskan bagaimana negara Korea Selatan mensolusikan masalah tersebut melalui penerapan program Korea Credit Guarantee Fund (KODITt) dan The Korea Technology Finance Corporator (KOTEC) untuk memfasilitasi *the green SME access to funding (the KOTEC and KODIT guarantee is very important in financing start-ups)*. Dari sisi kebijakan, selaras dengan hasil penelitian Farhad dkk (2021) pada paragraf di atas, OECD SME and Entrepreneurship Papers (2020) mengemukakan bahwa pandemi Covid-19 mendorong terwujudnya kebijakan di bidang pembiayaan terutama upaya untuk menghindari utang berlebih. Dalam hal ini Félix dkk (2021) berpandangan bahwa pandemi Covid-19 mendorong adanya kebijakan berbagai negara untuk membantu meringankan masalah pembiayaan UMK melalui penjaminan kredit.

Dalam menyikapi pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap UMKM, Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan strategis diantaranya menetapkan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja; PP No. 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan UMKM; dan PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko. Serta Kebijakan PEN Dukungan untuk UMKM, Gernas BBI, dan juga Kebijakan Percepatan Ekspor UMKM.

Melalui PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya dalam bidang pembiayaan telah dituangkan klausul Jaminan kredit (Pasal 80),



Bantuan pembiayaan pada klaster UMKM (Pasal 72), dan Bantuan khusus pada UMKM (Pasal 128). Pada sisi lain dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 pemerintah juga telah mengatur perijinan berdasarkan risikonya yaitu rendah, menengah, dan tinggi.

Sedangkan pada sektor stimulus program PEN, sampai dengan tanggal 22 Desember 2021, total realisasi PEN Dukungan UMKM sebesar Rp 78,71 T atau sebesar 81,81% (dari alokasi anggaran Rp 96,21 T) dengan jumlah debitur/UMKM sebanyak 34,14 juta. Terkait dengan program PEN, Bappenas (2021) mengungkapkan bahwa program tersebut sangat signifikan dalam mendukung daya tahan UMKM di masa pandemi Covid-19.

Pada sektor kebijakan Gernas BBI, secara empiris telah mampu mendorong UMKM *onboarding* (sejak dicanangkan pada pertengahan tahun 2020, sudah lebih dari 8 juta UMKM telah *onboard* pada pasar digital). Program Gernas BBI tidak hanya berfokus pada sektor *onboarding* saja, namun juga mencakup implementasi program pembinaan dan pelatihan terpadu terhadap UMKM yang melibatkan 17 Kementerian maupun Lembaga, program Dukungan *top local brand, coaching, mentoring, kolaborasi* dan *sharing marketplace*. Selain itu juga ada program dukungan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dalam bentuk laman khusus UMKM maupun e-catalog UMKM dan juga program Bank Indonesia (BI) dalam bentuk perluasan penggunaan QRIS (*Quick Response Code*

Indonesian Standard, merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran.

Pada sisi ekspor, pemerintah telah mendorong kemudahan proses dan juga perluasan pendampingan terhadap UMKM. Pada lingkup ekspor ini, Pemerintah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) telah mengimplementasikan untuk Usaha Mikro plafon s.d. Rp 5 M (Alokasi KMKE: *Kredit Modal Kerja Ekspor dan atau KIE: Kredit Investasi Ekspor*); Usaha Kecil dengan plafon s.d. Rp 25 M (Alokasi KMKE maksimal Rp 15 M; KIE maksimal Rp 10 M); dan Usaha Menengah dengan plafon s.d. Rp 50 M (Alokasi KMKE maksimal Rp 25 M; KIE maksimal Rp 25 M). Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan stimulus pemulihan UKM ekspor senilai Rp 1 triliun melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp 15 miliar per debitur dan suku bunga enam persen setahun (Djoko Retnadi, Direktur Pelaksana Indonesia Exim Bank 2019-2020, disampaikan: 19/11/2021).

Berbagai data dan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas memberikan pemahaman pada kita bahwa UMKM di masa pandemi covid-19 menghadapi persoalan serius terhadap akses pembiayaan. Kondisi geografis yang luas dan juga kondisi demografis masyarakat khususnya para pelaku UMKM yang beragam tingkat pengetahuannya (pendidikan, *knowledge*) serta adanya gap dukungan teknologi informasi menjadi salahsatu kendala dalam meliterasi ataupun mengedukasi UMKM.



Pada sisi lain, pandangan beberapa pelaku UMKM bahwa mereka menghadapi kesulitan dan kerumitan dalam mengakses pembiayaan juga harus menjadi perhatian. Untuk itu, fasilitasi melalui kemudahan dan kecepatan sistem pembiayaan dengan agunan dan bunga yang rendah harus menjadi perenungan agar terwujud.

b. Perluasan Pemasaran (melalui digitalisasi/ *onboarding*)

Hasil kurasi terhadap permasalahan yang dihadapi mayoritas UMKM selain sektor akses terhadap pembiayaan (sebagaimana diuraikan di atas) adalah persoalan menurunnya pendapatan UMKM karena kurang luasnya akses pemasaran. Perluasan akses pemasaran ini dapat disolusikan antara lain melalui program digitalisasi/ *onboarding* UMKM.

Pada sub bab di atas telah dijelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam meng-*onboarding*-kan UMKM diantaranya melalui program *Bangga Buatan Indonesia*. Selain itu juga sudah di bahas tentang kebijakan perluasan ekspor UMKM oleh pemerintah.

Adapun pada sub bab ini akan dibahas tentang bagaimana lingkungan strategik baik nasional, regional maupun internasional dalam menghadapi dan mensolusikan permasalahan tersebut.

Pada lingkup nasional, salah satu lembaga/ perusahaan teknologi informasi yaitu Cisco dalam researchnya yang berjudul *Cybersecurity for SMBs: Asia Pacific Businesses Prepare for*

Digital Defense (2021) menyampaikan laporan bahwa sebanyak 33% UMKM di Indonesia pernah terkena serangan siber dan sebanyak 68% terancam oleh kejahatan siber. Artinya bahwa harus ada pengamanan data terhadap UMKM, baik dari sisi usahanya yang masuk ke lingkup platform digital maupun keamanan dana mereka yang terfasilitasi dengan aplikasi dompet digital (QRIS, OVO, Gopay, Shopee pay, dll).

FGD dengan para pemangku kepentingan dan pelaku UKM di wilayah Toba secara empiris menunjukkan bahwa para pelaku UMKM mengharapkan adanya sentuhan dari pemerintah di beberapa bidang termasuk perluasan akses pemasaran yang antara lain bisa dilakukan melalui *onboarding* atau mengonline-kan UMKM. FGD di Kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan fakta bahwa persoalan bahan baku khususnya benang untuk ulos menjadi suatu persoalan, sehingga dalam FGD tersebut muncul keinginan untuk mengalokasikan sebagian dari lahan program ketahanan pangan menjadi lahan yang digunakan untuk memenuhi kekurangan bahan baku (peternakan ulat sutera dan tanaman bahan benang). Pada sisi lain dalam FGD tersebut juga terungkap kesulitan mereka untuk memasarkan produk UMKM ke luar daerah. Untuk itu sentuhan perluasan pemasaran antara lain melalui *onboarding* UMKM sangatlah diperlukan. Demikian pula FGD di Tobasa, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara juga terungkap adanya harapan untuk kemudahan dalam perluasan pemasaran produk hasil UMKM. Pada FGD yang dilakukan melalui zoom (2021),



pejabat Bank Indonesia (BI) wilayah Toba, mengungkapkan bahwa mereka sudah memiliki program pembinaan pada beberapa wilayah tersebut dan salah satu programnya adalah memberikan literasi onboarding kepada pelaku UMKM.

Adapun pada diskusi di kabupaten Magelang, Purworeja, dan Sleman mendapatkan fakta yang beragam. FGD di Magelang secara empiris tersirat bahwa UMKM di wilayah tersebut memerlukan perhatian pemerintah dalam perluasan akses pemasaran (Surya, 2021). “Sedangkan di kabupaten Sleman didapatkan fakta dari pemangku kebijakan/ pejabat daerah bahwa bahwa UKM di wilayahnya relatif sudah mapan, walaupun tidak dipungkiri jika ada bantuan fasilitasi perluasan pemasaran mereka akan sangat senang. Adapun di kabupaten Purworejo, dalam diskusi terungkap bahwa mereka menghadapi persoalan minimnya alat untuk kerajinan bambu dan selain itu juga terungkap adanya keinginan untuk perluasan pemasaran melalui ekspor” (Nova, 2021).

Beberapa aparaturnya Pemda Maluku (20 Desember, 2021) dalam diskusi di lantai 5 Gedung Kantor Pos Besar Jakarta Pusat, mengungkapkan bahwa persoalan pemasaran menjadi kunci utama bagi UMKM. Sehubungan dengan itu, mereka sangat memerlukan bantuan dari pemerintah untuk memfasilitasi UMKM boarding di bidang makanan minuman, pertanian, perkebunan, serta hasil perikanan.

Adapun pada lingkup regional, Asian Development Bank (ADB) dalam penelitiannya

mengungkapkan bahwa terdapat 4 hal yang harus diperhatikan terkait keberadaan UMKM/ *Small and Medium-Sized Enterprises* yaitu: (i) UMKM adalah tulang punggung perekonomian Asia. UMKM mampu menumbuhkan permintaan domestik dan menciptakan lapangan kerja secara nasional maupun regional; (ii) Transformasi ekonomi Asia dalam pemulihan pandemi memberikan kesempatan meningkatkan peluang bisnis bagi UMKM melalui digitalisasi, layanan keuangan digital dan e-commerce; (iii) Pengembangan UMKM tetap menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan inklusif di negara berkembang Asia; (iv) Perancangan kebijakan UMKM menjadi lebih menantang karena lingkungan eksternal yang berubah dengan cepat.

Ouyang Cheng & Zuo Chenmin (2021) mengemukakan tentang bagaimana China mendorong UMKM ke digitalisasi, disampaikan bahwa ekonomi digital telah berhasil mendorong peningkatan perekonomian nasional Tiongkok. Pada 2020, terdapat peningkatan sebesar 25% dalam penjualan retail. Selain itu pertambahan nilai ekonomi digital telah mencapai 39,2 triliun Yuan dan merupakan 38,6% dari PDB Tiongkok. Dikemukakan pula bahwa *Taobao Village* merupakan desa yang memiliki lebih dari 10 juta perdagangan dan memiliki lebih dari 100 toko online atau 10% dari total rumah tangga mengoperasikan toko online. Sedangkan, *Taobao Town* merupakan gabungan tiga *Taobao Village* dan memiliki total penjualan online lebih dari 30 juta Yuan serta memiliki lebih



dari 300 toko online. Taobao Village pada 2009 hanya mencakup tiga desa yang tergabung dan pada tahun 2019 sudah terdapat lebih dari seribu *Taobao Towns*. Penjualan tahunannya sudah melebihi 1,3 triliun Yuan dengan 3,6 juta toko online yang aktif, dan 10 juta kesempatan kerja. Mencermati proses pengembangan *Taobao Village*, terdapat tiga hal penting yang perlu mendapatkan perhatian yaitu: (i) Kewirausahaan akar rumput adalah pendorong utama dari pengembangan *Taobao Village*; (ii) Pemerintah perlu menyediakan banyak dukungan melalui infrastruktur, *public service*, dan membangun ekosistem; dan (iii) Platform digital memperkuat kewirausahaan akar rumput. Proses kurasi/seleksi produk, pendidikan dan pelatihan, serta dukungan pemerintah dalam infrastruktur dan dukungan kebijakan sangatlah diperlukan.

Adapun Shio Pao/ Director and Head of Research & Partnership, Ant Group (2021) menyampaikan bahwa UKM merupakan landasan dari ekonomi Tiongkok, di mana UKM menyumbang pada 50% pendapatan pajak nasional, 60% PDB, 70% capaian inovasi teknologi dan 80% total pekerja nasional. Ant Group telah membantu pengembangan lebih dari 80 juta UKM Tiongkok. Teknologi Digital telah membantu terciptanya keuangan yang inklusif, karenanya terdapat tiga hal penting dalam pengembangan tersebut yaitu: (i) Pembayaran digital dan jasa pedagang (*merchant*), pembayaran digital telah menjadi hal yang lazim di Tiongkok. Selain itu, teknologi digital telah mendukung pembayaran mikro yang

tinggi dan telah mendorong penjualan UKM. Dalam rangka pemulihan ekonomi saat pandemi covid-19, pemerintah Tiongkok juga telah melakukan pembagian *e-voucher* untuk mendorong pembelajaran online; (ii) Pendanaan mikro untuk UKM, melalui MYbank mampu mendorong 40 juta pendanaan mikro kepada pelanggan (lebih dari 80% adalah peminjam pertama kali). Ant Group juga telah membentuk model 310 untuk meningkatkan pengalaman pelanggan yakni 3 menit pendaftaran aplikasi pinjaman; 1 detik untuk persetujuan; 0 intervensi manusia (100% melalui AI); dan Teknologi digital untuk mendukung pengembangan perdesaan. Fintech merupakan salah satu hal yang paling efektif dalam mempromosikan keuangan inklusif. MYbank telah bekerja sama dengan pemerintah China dan bank mitra untuk mempromosikan keuangan inklusif. Selain itu, dalam menghadapi berbagai tantangan teknis, teknologi digital juga digunakan seperti penggunaan *Satellite Remote Sensing* untuk mengetahui pasokan dari hasil panen warga. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi penting dalam pengembangan ekonomi khususnya bagi UKM.

Adapun Fery Kusnowo/ Executive Director Lazada Indonesia (2021) menyampaikan dalam makalahnya bahwa Lazada berupaya meningkatkan 12 juta UMKM online pada 2022 dan 30 juta UMKM online pada 2024 sehingga Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar ASEAN pada 2025. Dengan mendorong ekosistem ekonomi digital dari bawah pada beberapa kota madya di Indonesia,



diharapkan dapat mendorong UMKM untuk *onboarding* pada ekonomi digital. Lazada memiliki program Akselerasi Karya Rakyat (AKAR) yaitu program yang diharapkan dapat mendorong penjual untuk meningkatkan persaingannya secara lokal/ domestik, mendorong pelanggan untuk memiliki kesadaran dan literasi digital serta untuk meningkatkan keterhubungan melalui jaringan logistik dan infrastruktur. Melalui program AKAR, Lazada ingin mendorong *onboarding* UMKM dan juga memfasilitasi edukasi UMKM. Salah satu tantangannya adalah banyaknya wirasusaha yang belum siap dan akses ke Indonesia timur yang masih belum mudah.

Pada lingkup global, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam outlook 2021 merekomendasikan tentang langkah yang harus dilakukan oleh pemerintahan di berbagai negara dalam menghadapi dampak covid yaitu: (i) Perlu kebijakan yang tegas dalam mengatasi UMKM agar keluar dari kebangkrutan; (ii) Diperlukan kebijakan tentang kesiapan digitalisasi, adanya cadangan kas, dan dukungan likuiditas pemerintah; (iii) Diperlukan kebijakan dalam mengatasi kerentanan struktural terhadap penguncian maupun gangguan bisnis termasuk perdagangan internasional dan *GVC/ Global Value Chain*.

Demikian pula, WTO dalam Presidensi G-20 juga memberikan rekomendasi terhadap SME's/ UMKM di sector pariwisata yang terdampak pandemi covid-19. Disampaikan bahwa diperlukan suatu upaya yang inovatif dan

adaptif serta berkelanjutan guna meningkatkan daya tahan SME's di masa pandemic melalui *rebuilding tourism for people, planet, and prosperity*. Terdapat tiga penekanan rekomendasi yaitu: (i) *Green transisiton of tourism for people* mencakup bagaimana mewujudkan pariwisata public yang sehat dan mampu mengangkat eksistensi dari UMKM sekitarnya dengan strategi yang adaptif dan inovatif; (ii) *Green transition of Tourism for planet* antara lain mencakup tentang bagaimana inovasi yang harus dilakukan guna menciptakan suatu ekosistem pariwisata baru seperti *biodiversity conservation* atau bisa juga diarahkan pada pariwisata alam; (iii) *Green Transition of Tourism for Prosperity* mencakup bagaimana mewujudkan sirkulasi iklim investasi ekonomi bidang pariwisata dan juga peningkatan peran kontribusi dari pemerintah maupun dalam bidang sirkulasi pembiayaan dengan melibatkan berbagai unsur.

Jika merujuk pada hasil pendalaman penelitian, baik yang dilakukan melalui FGD dan *critical appraisal* serta *meta analysis* terhadap berbagai literatur yang ada, dapat disimpulkan bahwa permasalahan perluasan pemasaran yang dihadapi oleh UMKM di masa pandemi covid-19 harus menjadi perhatian. Tumbuhnya teknologi informasi dan fenomena adaptasi perilaku masyarakat pada masa pandemi covid-19 telah mengubah cara masyarakat berbelanja. Pandemi telah mengubah beberapa masyarakat khususnya di kota untuk berbelanja dengan "aman" tanpa bersentuhan fisik dan juga nyaman tanpa harus datang ke lokasi penjualan namun barang bisa di

kirim sesuai harapan dan pesanan. Penurunan omset dan penurunan penjualan UMKM sebagaimana hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, diantaranya terjadi karena tumbuhnya teknologi informasi dan perubahan perilaku masyarakat di masa pandemi tersebut. Sehubungan dengan itu, upaya pemerintah untuk memperluas jaringan pemasaran UMKM melalui digitalisasi dan juga kemudahan ekspor menjadi harapan para pelaku UMKM.

Luasnya wilayah Indonesia dengan kondisi geografis kepulauan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk melakukan perluasan maupun penguatan jaringan teknologi informasi yang menjadi landasan bagi pengembangan UMKM digital. Dalam hal ini, sesungguhnya Presiden RI Joko Widodo sudah memberikan arahan terkait pentingnya perwujudan ekonomi digital, arahan tersebut secara detil mencakup Optimalisasi Kualitas SDM dan Infrastruktur, Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhanaan Regulasi, dan Percepatan Transformasi Ekonomi melalui Strategi: peningkatan Industrial, Destinasi Unggulan, dan Optimalisasi Eknomi. Kreatif & Ekonomi Digital.

SIMPULAN

Mencermati berbagai data dan fakta sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, disampaikan kesimpulan bahwa UMKM pada masa pandem covid-19i menghadapi permasalahan di bidang pembiayaan dan perluasan pemasaran melalui

digitalisasi. Sehubungan dengan itu, untuk mensolusikan dan mengungkit daya saing UMKM tersebut diperlukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Untuk mengungkit kemudahan UMKM dalam mengakses pembiayaan, diperlukan kebijakan pemerintah dalam hal:
 - a. Perluasan literasi dan edukasi melalui optimalisasi peran pembina/ penyuluh yang ada di semua kementerian/ lembaga untuk ikut mendesiminasikan/ meliterasi fasilitasi akses pembiayaan terhadap para pelaku UMKM;
 - b. Mewujudkan skema pembiayaan pada UMKM yang tepat, mudah, murah, dan cepat. Hal ini dapat dilakukan dengan kebijakan mengembangkan peran LPDB dan juga Anggaran Desa apakah bisa di dorong untuk menjembatani hal ini. Selain itu juga melalui pemanfaatan kontribusi peran swasta seperti Fintech;
 - c. Penguatan kebijakan yang lebih *linkage* antara pemerintah, pemda, swasta, dan berbagai *stakeholders* terkait guna menciptakan akses kemudahan pembiayaan terhadap UMKM.
2. Untuk mengungkit perluasan pemasaran melalui digitalisasi UMKM, diperlukan kebijakan pemerintah dalam hal:
 - a. Mendorong percepatan kontribusi berbagai pihak termasuk kementerian/ lembaga, pemda, dan swasta khususnya platform digital untuk



membantu fasilitasi UMKM agar dapat *onboarding*.

- b. Mendorong percepatan sistem dan mekanisme kemudahan ekspor UMKM melalui metode yang tersistem (bapak asuh, train of trainer, dan sebagainya termasuk membangun sistem berbasis teknologi informasi.
- c. Mendorong Kementerian terkait untuk perluasan akses jaringan internet dan penyusunan aplikasi sistem (manajemen, keuangan, dll) guna mendorong peningkatan daya saing UMKM.
- d. Mendorong percepatan pembangunan Data Base Tunggal sebagaimana amanat UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 7 Tahun 2021.
- e. Mendorong terwujudnya perlindungan data pribadi termasuk UMKM melalui program *cyber security*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni D., & Herlinawati E. 2019. Analisis Model Pembiayaan UMKM Melalui Peran Lembaga Keuangan Mikro. *Journal IMAGE Volume 8. Number 1. April 2019* ASEAN SME Policy Index. 2018
- Black S., Lane K., & Nunn L. 2021. Small Business Finance and COVID-19 Outbreaks.
- Cisco. 2021. Cyber Security for SMBs: Asia Pacific Business Prepare for Digital Defense.
- Cheng O., & Chenmin Z. 2021. The Impact of Taobao Villages in China for Inclusive Rural Development.
- Corredera-Catalán F., di Pietro F., & Trujillo-Ponce A. 2021. Post-COVID-19 SME financing constraints and the credit guarantee scheme solution in Spain, *Journal of Banking Regulation (2021) 22:250–260*.
- Cusmano, L. 2020. SME Finance Trends and the Public Policy Responses to Vovid-19, AECM 2020 General Assembly.
- European Investment Bank. SME Access to Finance Initiative.
- FGD. 2021. Diskusi Aparatur Pemda Maluku (Audiensi/ Konsultasi Aparatur Pemda Maluku ke Keasdepan Koperasi dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian).
- Hartwich F., & Larsen J. 2021. COVID-19 pandemic: threats to SMEs in poorest nations require swift policy action. <http://www.unido.org/stories/covid-19pandemic-threats-smes-poorest-nations-require-swift-policy-action> di akses 5 November 2021
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, FGD. 2021. Sinergi Program Pembinaan UMKM melalui pendekatan Klaster pada Destinasi Pariwisata Super Prioritas Toba (Diskusi di Kab. Tobasa, Kab. Humbang



- Hasundutan, Kab. Tapanuli Selatan, dan Kab. Tapanuli Utara).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, FGD. 2021. Sinergi Program Pembinaan UMKM melalui pendekatan Klaster pada Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur (Diskusi di Kab. Magelang, Sleman, dan Purworejo).
- Kim, S. S. 2019. Green SME Financing including Post-COVID-19 Aspects Asian Development Bank.
- Kusnowo, F. 2021. Accelerating Indonesia Progress Through Lazada AKAR.
- Leiwakabessy P., & Lahallo, F. F. 2018. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Pada Umkm Kabupaten Sorong. *Jurnal-DEPACE. Vol. 1. No. 1. Desember 2018.* (jurnal.lpmiunvic.ac.id/index.php/jpkm)
- McQuinn, J. 2019. SME access to finance in Europe: structural change and the legacy of the crisis, *Research Technical Paper. Vol. 2019. No. 10*
- OECD SME and Entrepreneurship Papers. 2020. Financing SMEs and Entrepreneurs: An OECD Scoreboard, Special edition: The impact of COVID-19.
- Pao, S. 2021. The Power of Small: SME Empowerment & Rural Finance at Ant Group
- Putri, S. 2021. The Role of Sharia Financing in the Development of UMKM in Indonesia. *AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1. No. 2* (Juni 2021).
- Retnadi, D. 2021. Membangun Pondasi UKM Ekspor Terpadu.
- Rokhim, R. 2021. Pidato pengukuran sebagai Guru Besar FEB UI. IDX Channel 13 Maret 2021.
- Suci D., & Agustina. 2019. Preferensi Sumber Pembiayaan Pada UMKM di Kota Magelang, Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers Fakultas Ekonomi Universitas Tidar.
- Taghizadeh-Hesary F., Phoumin H., & Rasoulinezhad E. 2021. COVID-19 and Regional Solutions for Mitigating the Risk of Small and Medium-sized Enterprise Finance in ASEAN Member States. *ERIA-DP-2021-32 No. 399*